



WRI INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN

PERIODE 2022

WRI-INDONESIA.ORG



Daftar Isi

Daftar Singkatan	2
Ringkasan Eksekutif	4
Tantangan dan Rencana ke Depan	7
Hutan dan Bentang Lahan	8
Perhutanan Sosial dan Pengakuan Wilayah Adat	8
Pengelolaan Hutan dan Lahan yang Lebih Inklusif Melalui Pelibatan Kelompok Perempuan dan Anak Muda	9
Pencapaian Berkelanjutan untuk Masyarakat di Sekitar Hutan	10
Pengelolaan Komoditas Berkelanjutan	12
<i>Review Izin</i>	13
Monitoring Lanskap dan Hutan	13
Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan	14
Sistem Pangan Berkelanjutan	15
Energi	16
Koalisi Sektor Komersil dan Industri	16
Energi Bersih untuk Dekarbonisasi Industri	17
<i>E-Mobility</i>	17
Laut	20
High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy	21
Tata Kelola Laut dan Produksi yang Berkelanjutan	22
Meningkatkan Kolaborasi dalam Upaya Pengurangan Sampah Plastik di Laut	23
Kota	24
Solusi Berbasis Alam	24
Ketahanan Kota	26
Iklm	28
Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon	28
Menedepankan Gaya Hidup Berkelanjutan untuk Mengurangi Emisi	29
Riset, Data dan Inovasi	30
Komunikasi	31
Rekan dan Sahabat WRI Indonesia	32
Laporan Keuangan	34
Sumber Daya Manusia	37

Daftar Singkatan

ACOP	: <i>Annual Communication on Progress</i>	ICRAF	: <i>World Agroforestry Center</i>
AFi	: <i>The Accountability Framework Initiative</i>	IIASA	: <i>International Institute for Applied Systems</i>
AKSI	: Aliansi Konservasi Indonesia	ILOK	: Izin Lokasi
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>	IUMK	: Izin Usaha Mikro Kecil
ASN	: Aparatur Sipil Negara	IUP	: Izin Usaha Perkebunan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	JIGD	: Jaringan Informasi Geospasial Daerah
BIG	: Badan Informasi Geospasial	SBTi	: <i>Science Based Target initiative</i>
BMP	: Best Management Practices	KADIN	: Kamar Dagang dan Industri Indonesia
BPDAS	: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	KBCF	: Kawal Borneo Community Foundation
CAC	: <i>Clean Air Catalyst</i>	KKI	: Komunitas Konservasi Indonesia
CEIA	: <i>Clean Energy Investment Accelerator</i>	KKN	: Kuliah Kerja Nyata
C4F	: <i>Cities for Forests</i>	KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
CHSE	: <i>Clean, Health, Safety, Environment</i>	KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
COP	: <i>Conference of the Parties</i>	KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
COVID	: <i>Coronavirus Disease</i>	KPPA	: Kelompok Pengrajin Perempuan Adat
CSOs	: <i>Civil Society Organizations</i>	KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
CUT	: <i>Coalition for Urban Transitions</i>	KUB	: Kelompok Usaha Bersama
DAS	: Daerah Aliran Sungai	LCDI	: <i>Low Carbon Development Initiative</i>
EBBT	: Energi Bersih, Baru, dan Terbarukan	LEZ	: <i>Low Emission Zone</i>
EMISI	: Inisiatif Pengurangan dan Penyerapan Emisi	LPHA	: Lembaga Pengelolaan Hutan Adat
ESC TF	: <i>Environment, Sustainability & Climate Change Task Force</i>	LPHD	: Lembaga Pengelola Hutan Desa
FOLU	: <i>Forestry and other land uses</i>	LTKL	: Jejaring Mitra Lingkar Temu Kabupaten Lestari
GAP	: <i>Good Agricultural Practices</i>	LTS	: <i>Long Term Strategy</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>	MEKAR	: Metode Evaluasi Kesempatan Restorasi
GEF	: <i>Global Environmental Facility</i>	MHA	: Masyarakat Hukum Adat
GRASP	: Gotong Royong Atasi Susut & Limbah Pangan	NCA	: <i>Natural Capital Accounting for Coastal Ecosystem</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca	NDCs	: <i>Nationally Determined Contributions</i>
HHI	: Konsorsium Hari Hutan Indonesia	NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
		NKT	: Nilai Konversi Tinggi

NIB	: Nomor Izin Berusaha	SIKATAN	: Sistem Informasi Kampung Agroforestry Tandun
NPAP	: <i>National Plastic Action Partnership</i>	SI PAKATAN	: Sistem Informasi Pendataan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
UNILAK	: Universitas Lancang Kuning	SONGKET	: Sistem Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>	SOP	: <i>Standard Operational Procedures</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah	Stranas PK	: Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi
PKTKH-HA	: Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan Hutan Adat	SUPA	: <i>Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN</i>
PLN	: Perusahaan Listrik Negara	TBS	: Tandan Buah Segar
PS	: Perhutanan Sosial	UCRA	: <i>Urban Community Resilience Assessment</i>
PPIIG	: Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial	UNCEN	: Universitas Cendrawasih
PRIMS	: Pranata Informasi Restorasi Ekosistem Gambut	UNEP	: United Nations Environment Programme
RDI	: Riset, Data, dan Inovasi	UNFCCC	: <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
REC	: <i>Renewable Energy Certificate</i>	UNIPA	: <i>Universitas Papua</i>
RPHA	: Rencana Pengelolaan Hutan Adat	UNL	: University of Nebraska Lincoln
RPHD	: Rencana Pengelolaan Hutan Desa	UNSRI	: Universitas Sriwijaya
RSPO	: <i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>	UPTD KPH	: Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>	WRI	: World Resources Institute
SI-GAMBUT	: Sistem Data dan Informasi Ekosistem Gambut	WWF	: <i>World Wildlife Fund</i>
SI HUTSOS	: Sistem Informasi Perhutanan Sosial	WWF	: <i>World Wildlife Fund</i>



Ringkasan Eksekutif

Kami, WRI Indonesia, melanjutkan pekerjaan pada tahun 2022 di tengah krisis ekonomi global dan tantangan COVID-19. Kami meneruskan pendekatan berupa perbaikan norma publik dengan memfasilitasi percepatan transformasi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, tangguh, dan rendah karbon.

Kami terus mendukung kegiatan di wilayah-wilayah prioritas yang menjadi ujung tombak perubahan. Kami bekerja di Provinsi Papua untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, di antaranya melalui skema Hutan Adat. WRI Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Jayapura, PTPPMA (Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua), Foker Papua, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), untuk membantu pemetaan wilayah adat, memfasilitasi pengusulan dan pembahasan kebijakan skema hutan adat untuk wilayah Kabupaten Jayapura. Pada bulan November 2022, Presiden Jokowi menyerahkan Surat Keputusan Menteri LHK No. SK8036/MENLHK-PSKL/P KTHA/PSL.1/10/2022 tentang Penetapan Status Hutan Adat Melra Kelrasena seluas 3.394 ha di Kampung Yongsu Desoyo, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura kepada perwakilan masyarakat hukum adat di Istana Negara.

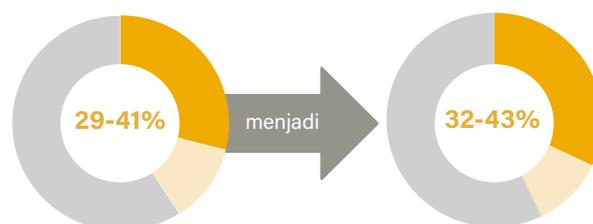
Kiprah kami dalam bekerja sama dengan kelompok masyarakat adat dan masyarakat lokal terus mendukung pengembangan rencana bisnis komoditas pertanian lokal di Sumatra, dan telah menghasilkan keterlibatan tingkat tinggi hingga setingkat gubernur provinsi yang berujung pada penandatanganan MoU antara pemerintah provinsi dan WRI Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan strategi iklim jangka panjangnya untuk mencapai target emisi nol-bersih sebelum tahun 2060, serta mengajukan *Nationally Determined Contributions* (NDC) yang disempurnakan dengan meningkatkan target pengurangan emisi dari 29-41% menjadi 32-43% pada tahun 2030. Selaras dengan komitmen pemerintah, kami melanjutkan dukungan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk meningkatkan ambisi iklim Indonesia untuk mencapai ekonomi rendah karbon dan mengurangi separuh emisi pada tahun 2030. Dukungan tersebut mencakup pembentukan Indeks Ekonomi Hijau Indonesia, skenario *Net Zero Emissions* Bappenas, dan untuk mendukung kerangka ambisi iklim di tingkat sub-nasional. Kami mendukung pemerintah Indonesia yang ditunjuk menjadi pemimpin KTT G20 pada tahun 2022, melalui keterlibatan dalam inisiatif B20 yang dipimpin oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN)

WRI Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Jayapura, PTPPMA (Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua), Foker Papua, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), untuk membantu pemetaan wilayah adat, memfasilitasi pengusulan dan pembahasan kebijakan skema hutan adat untuk wilayah Kabupaten Jayapura.



Pemerintah Indonesia mengajukan Nationally Determined Contributions (NDC) yang disempurnakan dengan meningkatkan target pengurangan emisi dari



pada tahun 2030.



untuk membangun KADIN Net Zero Hub. *Hub* ini memiliki tujuan akhir untuk mendukung bisnis dalam mencapai target emisi nol-bersih mereka yang selaras dengan Inisiatif Target Berbasis Sains (Science Based Target initiative/SBTi). Sejauh ini, lebih dari 10 perusahaan Indonesia aktif dalam “inkubator” SBTi, dengan lebih dari 30 perusahaan telah berkomitmen, dan 50 perusahaan lainnya sedang dalam proses.

Tim kelautan telah berkoordinasi erat dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mengurangi 70% sampah plastik pada tahun 2025, melalui inisiatif National Plastic Action Partnership (NPAP). NPAP telah memperluas anggotanya menjadi 150 organisasi dan meluncurkan satu rencana aksi multipemangku kepentingan disertai dengan lima dokumen peta jalan dari masing-masing gugus tugas

NPAP. NPAP juga aktif mendukung pemerintah untuk menyelenggarakan acara Ocean20 sebagai bagian dari agenda G20 Bali. Selain itu, tim kelautan telah menerbitkan beberapa makalah dan laporan akademik (misalnya *blue paper* HLP pariwisata laut berkelanjutan, Tren Kelautan dan Perikanan Indonesia, kondisi dan layanan ekosistem pesisir Nusa Tenggara Timur dan rencana zona pesisir, serta studi kemajuan Indonesia dalam transformasi lautan). Secara umum, kami telah melihat beberapa pencapaian luar biasa selama tahun 2022, termasuk keterlibatan kami dengan pemerintah dalam mendukung inisiatif B20 dan O20, juga dalam portofolio kehutanan dan tata guna lahan, di mana kami melanjutkan keterlibatan kami untuk mendukung inisiatif kajian perizinan dan mempromosikan inisiatif lokal untuk pertanian, perkebunan, dan mata pencaharian baru di Sumatra.

Lebih dari

10 perusahaan Indonesia aktif dalam “inkubator” SBTi, dengan lebih dari

30 perusahaan telah berkomitmen dan

50 perusahaan lainnya sedang dalam proses.



Tim kelautan telah berkoordinasi erat dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk

mengurangi **70%** sampah plastik pada tahun 2025, melalui inisiatif National Plastic Action Partnership (NPAP).



Dukungan di Tingkat Global

Perekonomian global diperkirakan akan melambat lebih lanjut pada tahun 2022, dipicu oleh agresi Rusia ke Ukraina yang mengakibatkan tekanan inflasi global, melemahkan kepercayaan dan daya beli rumah tangga, serta meningkatkan risiko di seluruh dunia. Ekonomi global diproyeksikan akan tumbuh jauh di bawah hasil yang diharapkan sebelum perang, yakni 3,1% pada tahun ini, sebelum melambat menjadi 2,2% pada tahun 2023 dan pulih secara moderat ke 2,7% yang masih di bawah standar pada tahun 2024.

Pertumbuhan pada tahun 2023 sangat bergantung pada ekonomi pasar berkembang utama Asia, yang akan mencapai hampir tiga perempat dari pertumbuhan PDB global tahun depan, dengan Amerika Serikat dan Eropa melambat tajam. Inflasi yang terus-menerus, harga energi yang tinggi, pertumbuhan pendapatan rumah tangga riil yang lemah, kepercayaan yang menurun, dan kondisi keuangan yang lebih ketat semuanya diperkirakan akan membatasi pertumbuhan. Bagi Indonesia, agresi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung sejak bulan Februari 2022 mengakibatkan permasalahan impor gandum dari Ukraina ke Indonesia. Selain itu, rantai pasokan global yang terganggu dan kenaikan harga komoditas telah mengakibatkan inflasi (jangka panjang), di atas inflasi yang disebabkan oleh pandemi.

WRI Indonesia mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan tujuan ketahanan pangan melalui program Food and Land Use (FOLU) Coalition, yang memiliki tujuan utama untuk mencapai pembangunan di sektor pangan dan pertanian yang berkelanjutan, inklusif, rendah karbon, serta dapat mencapai target pemerintah dalam mencapai kecukupan gizi masyarakat.

Selain itu, perhelatan B20 yang digelar pada bulan November 2022 di Bali, Indonesia, telah menghasilkan beberapa keputusan penting guna menghadapi permasalahan krisis iklim serta krisis ekonomi global yang berlangsung saat ini. WRI Indonesia bekerja sama dengan KADIN telah melanjutkan upaya mendukung sektor industri dan korporat menengah besar di Indonesia dalam mencapai target emisi nol-bersih mereka menggunakan pendekatan *Science Based Target* (SBT). Upaya ini diharapkan akan mendukung komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 32-43% pada tahun 2030 sesuai dengan dokumen NDC Indonesia yang terbaru. Di samping itu, WRI Indonesia sebagai Sekretariat NPAP juga mendukung Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) di perhelatan G20 dalam beberapa kegiatan kunci, termasuk *engagement* dengan sektor usaha, *multi-development bank*, serta pemerintah negara sahabat, guna mendukung komitmen pemerintah dalam mengurangi sampah plastik di lautan sebanyak 70% pada tahun 2025 dan mencapai target nol sampah plastik pada tahun 2040.



Tantangan dan Rencana ke Depan

Respons pandemi Indonesia memasuki tahun ketiga sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan pada 3 Maret 2020. Kondisi saat ini harus dipertahankan dengan modalitas yang telah dibentuk karena masih terdapat kemungkinan beberapa tantangan dan ancaman yang harus dihadapi.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah dicabut pada akhir Desember 2022, sehingga diharapkan dapat mempercepat perputaran roda pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, serta berdampak pada pertumbuhan sektor riil lainnya. Berbagai tantangan dan rencana ke depan terkait program-program yang akan dilakukan oleh WRI Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Krisis energi dan pangan sebagai akibat dari krisis global akibat perang Ukraina dan Rusia yang masih akan terus berlangsung pada tahun 2023 ini. Ini akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan global, serta berpengaruh baik secara langsung maupun tidak terhadap kebijakan di Indonesia.
- Tahun politik 2024 dan potensi meningkatnya suhu politik serta instabilitas nasional, yang dapat berdampak pada pertumbuhan sosial ekonomi di Indonesia.
- Pemerintah saat ini masih fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, sementara masalah krisis iklim dan lingkungan diletakkan pada prioritas berikutnya.
- Koordinasi dan komunikasi antar lembaga pemerintah, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang tidak selalu berjalan baik dan perlu mendapatkan perhatian guna meningkatkan kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Guna mendukung program pembangunan pemerintah, sebagai lembaga riset independen WRI Indonesia memiliki fokus kerja di bidang kehutanan dan tata guna lahan, energi, perubahan iklim, perkotaan dan kelautan. Saat

ini WRI Indonesia sedang dalam proses menyusun strategi lima tahunan (2023-2027). Beberapa rencana yang akan dilakukan ke depan antara lain:

- Implementasi pendekatan WRI untuk mencapai tujuan yang seimbang antara manusia, alam, dan iklim.
- Mendukung pemerintah pusat dalam mencapai target emisi nol-bersih sebelum tahun 2060 yang inklusif, berketahanan iklim, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Mendukung pemerintah provinsi dalam transformasi pembangunan sektoral guna menuju target pembangunan rendah karbon. Misalnya, melalui *Bali Climate and Green Development Initiative* yang dilakukan untuk mempercepat transisi menuju kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
- Melanjutkan dukungan dan intervensi terhadap sektor usaha dalam mendukung upaya sektor swasta dalam mencapai target emisi nol-bersih sejalan dengan *Science Based Target Initiative* (SBTi).
- Bekerja dengan komunitas lokal dan masyarakat adat untuk meningkatkan formalisasi/pengakuan wilayah adat, mempercepat implementasi perhutanan sosial, dan meningkatkan mata pencaharian, terutama untuk masyarakat yang hidup di sekitar hutan.
- Meningkatkan kerja sama dan studi untuk memperkuat monitoring hutan dan ekosistem lahan basah (gambut dan mangrove), serta mengembangkan solusi dan sumber pendanaan inovatif yang dapat memberikan insentif terhadap provinsi kaya hutan di Indonesia.



Hutan dan Bentang Lahan

Perhutanan Sosial dan Pengakuan Wilayah Adat

WRI Indonesia bersama dengan mitra pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) melanjutkan kerja-kerja pendampingan masyarakat adat di Tanah Papua, Sumatra, dan Kalimantan. Pendampingan yang dilakukan meliputi pengurusan izin perhutanan sosial hingga membantu masyarakat dalam memanfaatkan izin yang sudah dimiliki agar hutan dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang hidup di sekitar wilayah hutan.

WRI Indonesia di Tanah Papua berkolaborasi dengan GTMA (Gugus Tugas Masyarakat Adat), FOKER NGO Papua, PPIIG UNIPA, dan BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat) membantu masyarakat adat menyampaikan usulan hutan adat antara lain melalui proses pemetaan, koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kebijakan di wilayah Papua. Mulai tahun 2019, WRI Indonesia mendukung pemetaan wilayah adat berskala besar di Kabupaten Jayapura bersama GTMA melakukan pemetaan partisipatif di 92 kampung dengan luasan sekitar 300 ribu ha. Selain itu, dukungan fasilitasi pengurusan wilayah adat untuk mendapatkan skema hutan adat melalui perhutanan sosial telah dilakukan khususnya di Kampung Yongsu Desoyo yang berada di Kabupaten Jayapura dengan luas 3.393 ha. WRI bersama dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua juga telah memfasilitasi proses pemetaan partisipatif lima wilayah adat seluas 20.666 ha di Kabupaten Sarmi yang sedang dalam proses pengurusan pengurusan hutan adat di KLHK.

WRI Indonesia melanjutkan pendampingan pengurusan hutan adat di Sumatra dan Kalimantan. Tahun ini, satu wilayah yakni Hutan Adat Sakai Bathin Sobanga telah memperoleh pengakuan dari pemerintah Provinsi Riau dan kemudian diteruskan untuk didaftarkan ke KLHK, sedangkan di Provinsi Aceh, satu hutan adat telah didaftarkan ke KLHK.

WRI Indonesia mendukung KBCF (Kawal Borneo Community Foundation) dalam pengurusan hutan adat di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Selain itu, WRI Indonesia juga berkolaborasi dengan KKI WARSI.

Kami juga membantu dalam mewujudkan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan (RPH), yakni dua RPH di Aceh, satu RPH di Kalimantan, dan tiga di Sumatera Barat. RPH ini penting untuk memastikan pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar hutan.

Selain itu, WRI juga membantu mengembangkan sistem informasi untuk perhutanan sosial di tingkat provinsi. Di Sumatera Barat, Sistem Informasi Perhutanan Sosial (SIPS) telah berhasil dikembangkan dan mulai dimanfaatkan oleh para pihak. Sementara itu, sistem informasi serupa di Aceh mulai dibangun sejak akhir tahun 2022.

Dalam rangka mendukung kebijakan percepatan implementasi dan pengembangan perhutanan sosial di Sumatera Selatan, WRI Indonesia memberikan dukungan peningkatan kapasitas kepada petugas dari Dinas Kehutanan. Peningkatan kapasitas yang diberikan seperti pelatihan dasar fasilitasi dan pendampingan perhutanan sosial, serta pemetaan bagi penyuluh dan pendamping perhutanan sosial.

WRI Indonesia turut mendorong adanya dukungan dari para pemangku kepentingan di semua tingkatan untuk pengembangan usaha kelompok perhutanan sosial, misalnya dukungan kebijakan atau penganggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah desa. Beberapa contoh sukses dapat dilihat dari dukungan penuh pemerintah di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Aceh.

Gubernur Sumatera Barat telah mendeklarasikan operasionalisasi Sistem Informasi Perhutanan Sosial (SIPS). WRI berperan untuk membantu pengembangan serta mengoordinir pengelolaan multipihak platform tersebut. Sementara itu, Gubernur Aceh telah menetapkan SK POKJA PPS dan pembentukan tim sistem informasi monitoring hutan.

Pengelolaan Hutan dan Lahan yang Lebih Inklusif Melalui Pelibatan Kelompok Perempuan dan Anak Muda

Tahun ini, WRI mendukung pembentukan dua kelompok usaha perempuan di Sumatera Barat yaitu KUPS Asam Kandis Bundo Gamaran dan KUPS Induak Upiah. KUPS Asam Kandis beranggotakan 25 perempuan dan menghasilkan produk olahan buah asam kandis (*Garcinia xanthochymus*) berupa asam kandis kering dan sirup asam kandis, sedangkan KUPS Induak Upiah terdiri dari 20 perempuan yang menghasilkan produk olahan pinang dan kue kering dari buah pinang. Terbentuk juga dua

kelompok usaha yang terdiri dari para pemuda (KUPS Pesona Pagadih dan KUPS Puteri Pintu), serta tiga kelompok campuran (KUPS Kopi Alam Merdeka, KUPS Karang Putih, & KUPS Kulem Kulak) yang tersebar di satu hutan desa di Provinsi Aceh dan tiga hutan nagari di Provinsi Sumatera Barat.

Tiap kelompok telah mendapatkan pelatihan terkait manajemen kelompok, *gender awareness* melalui kegiatan "*Gender Action Learning for Sustainability*" dan mengaktivasi forum pembelajaran silang, serta telah menginternalisasi unsur GESI pada dokumen rencana aksi tahunan, SOP, AD/ART kelompok, dan rencana pengelolaan hutan desa/nagari di tingkat kelompok perhutanan sosial (LPHD/LPHN).





Buah asam kandis dan produk sirup (foto: Tasniah Fauzi)

WRI Indonesia fokus mengembangkan inisiatif mata pencaharian berkelanjutan di Kelompok Hutan Nagari Salibutan, khususnya kelompok perempuan Bundo Gamaran. Kelompok ini membuat produk-produk turunan dari buah asam kandis yang dikenal sebagai salah satu bumbu masakan di Sumatera Barat.

Produk utama berupa buah asam kandis kering yang telah diproduksi secara turun temurun, tetapi dengan harga yang sangat rendah yakni hanya sekitar Rp25.000/kg buah kering. Hal ini mengakibatkan pohon asam kandis yang sudah berumur puluhan tahun mulai ditebang karena dianggap tidak memiliki nilai ekonomi yang baik. Melihat kondisi ini, WRI berdiskusi secara intensif dengan kelompok perempuan, LPHN, dan KPH Bukit Barisan untuk melihat potensi peningkatan nilai ekonomi buah asam kandis dengan peningkatan kualitas produk utama buah kering dan juga pengembangan produk turunannya.

Sebagai langkah awal, kelompok perempuan didampingi untuk meningkatkan higienitas pengolahan buah asam kandis kering dengan membangun rumah jemur sederhana, karena sebelumnya buah asam kandis dijemur dengan menggunakan terpal/tikar langsung di atas permukaan tanah. Saat ini terdapat dua rumah jemur sederhana dan kelompok ini berencana

akan membangun lebih banyak rumah jemur agar setiap rumah tangga yang memiliki produk asam kandis dapat meningkatkan higienitas produknya.

Selain itu, WRI Indonesia juga mendampingi kelompok untuk meningkatkan kualitas kemasan produk dan juga pemasarannya. Saat ini, produk asam kandis kering Bundo Gamaran telah memiliki kerja sama pemasaran dengan beberapa swalayan besar di Kota Padang dan juga salah satu gerai ritel skala nasional. Dengan intervensi ini, nilai produk asam kandis kering meningkat cukup signifikan, dari yang sebelumnya hanya Rp25 ribu menjadi Rp75 ribu per kilogram.

Di Sumatera Selatan, WRI Indonesia mendampingi kelompok perempuan di sekitar Hutan Adat Tebat Benawa yang berfokus pada pengolahan kopi. Hasil kopi olahan kelompok perempuan kemudian di jual ke toko-toko di dalam desa dan desa-desa sekitarnya. Kami juga memberikan peningkatan kapasitas kelompok dengan memberikan pelatihan pengolahan produk turunan kopi.

Selain itu, WRI Indonesia juga mendampingi kelompok pemuda dari Masyarakat Adat Tebat Benawa-Rempasai dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Desa Wisata Tebat Benawa mendapat penghargaan sebagai juara pertama kategori daya tarik pengunjung dalam ajang Anugerah Desa Wisata Sumatera Selatan 2022.

Pencarian Berkelanjutan untuk Masyarakat di Sekitar Hutan

Pada tahun 2022, WRI Indonesia masih melanjutkan dukungan terhadap berbagai inisiatif *livelihood* di Riau. Dukungan ini sangat krusial mengingat inisiatif yang dijalankan relatif masih baru dan membutuhkan berbagai penguatan agar dapat mandiri dan berkembang.

WRI Indonesia mendukung usaha kerajinan anyaman pandan Kodai Umbai di Provinsi Riau dengan membantu mengembangkan pasar. Kini Kodai Umbai telah bekerja sama dengan salah satu pusat oleh-oleh terbesar di Pekanbaru serta mulai mengakses pasar *premium corporate merchandise* untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau organisasi yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan usaha-usaha kecil. Perkembangan ini tidak terlepas dari perbaikan struktur kepengurusan Kodai Umbai untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini serta memastikan keterlibatan kelompok perempuan. Dari skema pemasaran ini Kodai Umbai berhasil memperoleh omset lebih dari Rp40 juta dengan menjual lebih dari 300 produk.

Di Kabupaten Kampar, Riau, WRI Indonesia terus mendampingi masyarakat dalam menjalankan usaha budi daya madu sekaligus mengembangkan usaha ke sektor edu-ekowisata. Saat ini, KUPS Madu Kelulut Imbo Pomuan di Kabupaten Kampar mulai mengembangkan usahanya menjadi pusat

pembelajaran pembudidayaan lebah kelulut dan pengelolaan hutan adat. Pengembangan ini juga telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, swasta, hingga perguruan tinggi di tingkat regional maupun nasional. Untuk terus meningkatkan kualitas, WRI Indonesia juga bekerja sama dengan Universitas Lancang Kuning (UNILAK) memberikan peningkatan kapasitas kepada anggota KUPS dalam hal komunikasi, baik untuk berhubungan dengan *stakeholders* maupun konsumen dari usaha mereka.

Sejak tahun 2021, WRI Indonesia juga mendukung program adopsi pohon sebagai wadah bagi publik untuk berkontribusi menjaga hutan sekaligus meningkatkan penghidupan masyarakat di sekitar hutan agar tetap lestari. Pada tahun 2022, total Rp144,65 juta dana adopsi pohon telah diserahkan kepada 21 kelompok perhutanan sosial untuk dikelola. Hasilnya, sebanyak 1.269 pohon telah diadopsi dari total 13.787 pohon yang tersedia di sistem Adopsi Pohon Riau. Pohon telah diadopsi, baik secara individu maupun organisasi. Selanjutnya, tim juga melakukan monitoring lapangan untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh dimanfaatkan dengan baik untuk menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan penghidupan anggota kelompok melalui usaha-usaha produktif. Kami juga memberikan dukungan kepada pengelola adopsi pohon untuk mempromosikan program tersebut melalui media televisi agar dapat menjangkau calon *adopter* yang lebih luas.





Pengelolaan Komoditas Berkelanjutan

Sebagai negara berkembang, perekonomian Indonesia masih didukung secara signifikan oleh sektor berbasis lahan, khususnya dari komoditas kelapa sawit, kehutanan, serta *pulp* dan kertas. Sektor tersebut berkontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia serta mempekerjakan puluhan juta pekerja di sepanjang rantai pasoknya. Akan tetapi, sektor berbasis lahan di Indonesia juga masih banyak dikaitkan dengan berbagai isu multi dimensi yang mencakup berbagai permasalahan lingkungan dan sosial termasuk kebakaran, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan konflik sosial. Oleh karena itu, praktik bisnis yang berkelanjutan tidak dapat terhindarkan untuk menjamin keberlangsungan Bumi serta daya saing dari bisnis itu sendiri.

Sejak 2019, WRI Indonesia telah bermitra dengan University of Nebraska-Lincoln (UNL) untuk memimpin inisiatif 4 tahun guna meningkatkan produktivitas kelapa sawit milik petani mandiri di Indonesia melalui proyek Global Yield Gap Atlas Project (GYGA). Program ini dilaksanakan di enam provinsi percontohan di Indonesia, termasuk lokasi percontohan yang telah dikelola oleh WRI di Provinsi Riau. Setelah menerima bantuan implementasi praktik pengelolaan terbaik (*Best Management Practices/BMP*) dari UNL dan mitranya, rata-rata peserta BMP berhasil meningkatkan produksi mereka setelah tahun pertama, kedua, dan ketiga proyek masing-masing sebesar 12%, 32%, dan 50%. Keuntungan petani kecil juga meningkat sebesar 20%.

WRI Indonesia saat ini merupakan Sekretariat Accountability Framework Initiative (AFi) untuk Kawasan Asia Tenggara. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pengarusutamaan etika rantai pasok dan prinsip produksi komoditas berkelanjutan. Sejak tahun 2022, Koalisi SEA AFI memberikan bantuan teknis untuk sektor swasta khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di empat provinsi, yakni di Riau, Sumatera Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat, bekerja sama dengan koalisi CORE (Riau), kabupaten program USAID Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR), dan mitra lokal lainnya di Indonesia untuk membantu memperkuat hubungan antara tindakan yang dipimpin oleh rantai pasokan dan yurisdiksi. Selain itu, WRI dengan AFI juga menyediakan klinik pendampingan untuk pencapaian indikator keberlanjutan komoditas di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin.

Program Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) juga sedang berlangsung di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Banyuasin serta secara parsial di Kabupaten Musi Banyuasin. Di Banyuasin, terdapat tiga kegiatan utama yaitu identifikasi stakeholder kelapa sawit, pembentukan forum *multistakeholder* atau Public Private Partnership (PPP), dan pembuatan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) 2023-2028 Kabupaten Banyuasin. Forum PPP yang terbentuk telah berperan dalam mengembangkan kerangka kerja dan standar rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan serta terlibat sebagai tim penyusun RAD KSB Banyuasin.

Review Izin

Sejak tahun 2019, WRI Indonesia mendukung Pemerintah Provinsi Papua dalam melakukan evaluasi perizinan sawit dan kompilasi data Informasi Geospasial Tematik (IGT) sawit dalam rangka percepatan kebijakan satu peta di delapan kabupaten. Selain itu, WRI juga sedang menyusun peta jalan pascapencabutan izin yang bertujuan untuk memastikan bahwa lahan yang telah dicabut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adat Papua dan kelestarian hutan Papua. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Bappeda Provinsi Papua, serta melibatkan berbagai kementerian/lembaga/dinas terkait lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, seperti: Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan lain-lain.

Beberapa hasil kunci dan capaian yang telah dihasilkan hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Papua berkomitmen untuk melakukan pencabutan terhadap perusahaan-perusahaan yang direkomendasikan untuk dicabut, yakni 35 perusahaan, dengan total luasan sekitar 500.000 ha.
2. Hingga saat ini, Pemerintah Papua telah mencabut 71.000 ha, dan akan mencabut satu izin perusahaan di Keerom dengan luasan 4.000 ha pada awal tahun ini. Selain itu, akan ada beberapa perusahaan lainnya yang dicabut setelah pemberian peringatan tertulis.
3. Untuk mempercepat pelaksanaan evaluasi, beberapa kabupaten telah membentuk tim kerja untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap izin-izin yang sudah direkomendasikan untuk dicabut.
4. Pada akhir 2022, Pemerintah Provinsi Papua telah berhasil melakukan kompilasi dan integrasi data IGT sawit di delapan kabupaten. Data ini sudah diserahkan kepada Kementerian Pertanian dan BIG.
5. WRI membentuk tim ahli yang sedang menyusun peta jalan pascapencabutan izin.

Monitoring Lanskap dan Hutan

Landscape monitoring and response initiative adalah inisiatif *multistakeholder* yang memanfaatkan platform Global Forest Watch (GFW) untuk memprioritaskan upaya pemantauan deforestasi dan respons kolaboratif di tingkat lanskap/kabupaten. Yurisdiksi pertama yang diidentifikasi sebagai percontohan adalah Kabupaten Siak di Provinsi Riau, di mana WRI Indonesia mulai bekerja pada tahun 2019.

Pemantauan lanskap di Kabupaten Pelalawan, Riau, dengan luas 1,3 juta ha berada di bawah Program Lanskap Siak-Pelalawan yang bermitra dengan Proforest dan Daemeter untuk implementasi proyek. Pemangku kepentingan yang terlibat antara lain Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPSTP), Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disbunnak), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sorek. Analisis menghasilkan 47 peringatan prioritas dan berhasil memverifikasi delapan peringatan, 14 protokol besar peringatan terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo. Semua deforestasi yang terverifikasi disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit skala kecil dengan benih kelapa sawit yang ditanam.





Inisiatif pemantauan lanskap di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur, dilakukan dengan bermitra dengan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) dan Fokum Konservasi Leuser (FKL). WRI Indonesia berfokus pada monitoring teknis dan pengembangan protokol respons di kedua kabupaten tersebut yang mencakup area seluas lebih dari 750 ribu ha. Pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disbunnak Aceh Tamiang), Center of Excellence (CoE) for Sustainable Plantation Aceh Tamiang (forum multipihak), Unit Pengelolaan Hutan III (wilayah kerja di kedua kabupaten), dan YAKATA (LSM lokal Aceh Timur). Inisiatif ini telah menghasilkan 88 peringatan prioritas dan berhasil memverifikasi 15 peringatan, sebagian besar peringatan terjadi di daerah yang sulit dan kurangnya upaya dari verifikator. Protokol respons dikembangkan dan disetujui oleh pemangku kepentingan utama. WRI Indonesia beserta mitra juga telah berhasil membentuk tim pemantau deforestasi regional untuk memantau hutan di luar kawasan hutan dan disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang.

Inisiatif monitoring lanskap di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dilakukan dengan bermitra bersama program Indigenous People and Local Community (IPLC) WRI Indonesia dalam pelaksanaannya. Pemangku kepentingan utama yang terlibat antara lain: Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disbunnak Aceh Tamiang), dua kelompok masyarakat lokal (perhutanan sosial), Kesatuan Pengelolaan Hutan II dan III (wilayah kerja bersama di Bener Meriah).

Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan

WRI Indonesia melanjutkan inisiatif untuk membantu pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Dukungan diberikan melalui peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan untuk melakukan monitoring restorasi lahan gambut dan mangrove. Selain itu, perangkat dan mekanisme untuk mengidentifikasi peluang restorasi dan upaya-upaya restorasi di lahan-lahan yang terdegradasi juga terus dilakukan.

Bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Data Spasial (PPIIDS) Universitas Sriwijaya, WRI melanjutkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pemutakhiran basis data gambut. Sebanyak 26 data spasial baru untuk tematik gambut telah dimutakhirkan. Peningkatan kapasitas untuk melakukan survei tanah dan hidrologi gambut dilakukan bersama dengan Tim Pengelola Basis Data Gambut di Sumatera Selatan.

Dalam jangkauan yang lebih luas, WRI Indonesia bekerja untuk membantu para pemangku kepentingan dalam mengembangkan basis data lahan gambut, penelitian yang berfokus pada pengelolaan lahan gambut, serta memperkuat jaringan dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan non-pemerintah di Asia Tenggara melalui konsorsium People For Peat. Konsorsium beranggotakan WRI Indonesia, Tropical Rainforest

Conservation & Research Center (TRCRC), dan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) berkegiatan di delapan negara Asia Tenggara, yakni di Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Inisiatif ini juga bertujuan mendorong wacana mengenai pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Pada tahun 2022, *database* lahan gambut dengan peta interaktif telah tersedia melalui laman www.peopleforpeat.org. Sembilan riset di enam negara Asia Tenggara yang berfokus pada pengelolaan lahan gambut telah dihasilkan. Sejak tahun 2021 hingga tahun 2022, dikembangkan pendanaan untuk model-model pendanaan dan bimbingan teknis untuk kegiatan-kegiatan bisnis berkelanjutan di lahan gambut di lokasi terpilih di Asia Tenggara.

Model pendanaan inovatif untuk tanah gambut melibatkan sepuluh anggota koneksi (*hub*) bisnis dari Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand. Mereka didampingi sejumlah ahli untuk memberikan bimbingan teknis dalam pengelolaan bisnis di lahan gambut yang berkelanjutan.

Sistem Pangan Berkelanjutan

Dengan penduduk Indonesia yang terus bertambah, kebutuhan akan pangan pun berlipat ganda. Sistem pangan yang berkelanjutan memastikan agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi, tidak hanya dari segi kuantitas pangan, tetapi juga kualitasnya, dan tanpa mengorbankan lingkungan.

Sebagai sekretariat dari Food and Land Use (FOLU) Coalition, WRI Indonesia mendukung transformasi sistem pangan dan tata guna lahan di Indonesia. Untuk mendorong transformasi sistem pangan yang menyeluruh, WRI di bawah FOLU Coalition bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam mengembangkan modelling yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). FOLU juga mendorong kolaborasi dengan organisasi-organisasi lain seperti universitas, organisasi masyarakat sipil, lembaga riset lainnya. Saat ini, FOLU juga sedang mendorong pengembangan platform nasional yang mencakup organisasi-organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu sistem pangan di Indonesia.

WRI juga mendukung FOLU dalam mendiseminasikan isu-isu prioritas seperti pola makan sehat, susut dan limbah pangan, regionalisasi pangan, serta tata guna lahan berkelanjutan. Untuk menjangkau masyarakat luas, WRI mendukung pengembangan berbagai produk dan aktivitas komunikasi seperti webinar, penulisan artikel opini, pembuatan video, penerbitan artikel blog, serta pembuatan buklet infografis. Selain itu, melalui kanal Instagram WRI Indonesia, sepanjang tahun 2022 setidaknya terdapat 25 konten terkait sistem pangan yang berhasil mendapatkan lebih dari 160.000 *impressions*.



Energi

Koalisi Sektor Komersil dan Industri

WRI Indonesia, dalam upaya memperkuat koalisi sektor swasta, telah mendorong penyebaran pengembangan energi terbarukan dan meningkatkan permintaan terhadap energi terbarukan dengan mengembangkan produk-produk inovatif bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memenuhi target keberlanjutan dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Contoh aktivitas yang kami lakukan di antaranya melalui dukungan teknis yang diberikan kepada perusahaan atau *corporate buyers* seperti H&M Group dalam pengembangan konversi boiler biomassa hingga mencapai porsi 40% serta memfasilitasi kebutuhan bahan baku biomassa yang bekerja sama dengan INHUTANI. Selain itu, kami memberikan dukungan teknis dengan PT. Angkasa Pura I untuk strategi dekarbonisasi dan

pengadaan energi bersih melalui solar panel, serta dengan ITDC Utilitas Nusa Dua, Bali, untuk kajian peningkatan model bisnis untuk solusi energi bersih dalam aspek energi efisiensi.

Melalui inisiatif Clean Energy Investment Accelerator (CEIA), kami terus mendorong upaya transisi energi terbarukan di seluruh sektor Komersial dan Industri (K&I) dengan memperluas kolaborasi dengan sektor-sektor dan pemangku kepentingan yang relevan, serta telah menandatangani dokumen aspirasi bersama dengan sembilan asosiasi bisnis yang merepresentasikan 2.027 perusahaan dan unit bisnis. Dalam dokumen ini, kami memuat aspirasi dari pelaku bisnis dan rekomendasi intervensi untuk mempercepat dekarbonisasi sektor K&I yang telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kantor Staf Presiden, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta jajaran pemangku kebijakan lain yang relevan.





Energi Bersih untuk Dekarbonisasi Industri

Untuk mendiversifikasi dan mempermudah akses terhadap listrik dari energi bersih, WRI Indonesia terus melanjutkan kerjasama dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara) untuk mengembangkan produk hijau seperti Renewable Energy Certificate (REC) dan *green tariff* yang tepat guna dalam menjawab permintaan energi bersih dari sektor komersil dan industri. Dengan adanya produk-produk hijau tersebut, sektor komersil dan industri dapat berkontribusi langsung pada pengembangan pembangkit-pembangkit energi bersih.

Selain itu, WRI Indonesia juga berkolaborasi dengan kawasan industri Jawa Barat dan perusahaan-perusahaan multinasional dan nasional untuk menciptakan model bisnis dan solusi alternatif untuk tenaga panas (*heat*) yang dipakai untuk proses industri. Salah satunya adalah penggantian *feedstock boiler* dari bahan bakar batu bara menjadi biomasa berkelanjutan. Dalam keberjalanannya, WRI Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Bioenergi, Kementerian ESDM, untuk merancang kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam menjamin aspek keberlanjutan dari biomassa.

E-Mobility

Pemerintah Provinsi Bali dan WRI Indonesia telah resmi meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) 2022-2026 pada bulan Januari 2023, yang saat ini tercatat sebagai RAD pertama di Indonesia yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk percepatan transisi kendaraan listrik. WRI Indonesia mendukung penyusunan RAD KBLBB tersebut melalui riset dan analisa-analisa kunci, antara lain pemodelan preferensi, total biaya kepemilikan (*total cost of ownership*), dan pemetaan pemangku kepentingan kendaraan listrik. RAD ini bertujuan untuk menjadi rujukan arah pengembangan transisi mobilitas elektrik di Bali dalam upaya untuk membentuk suatu ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui strategi 5 pilar yaitu manajemen, infrastruktur, industri dan baterai, sumber daya manusia dan komunikasi.

Sebagai upaya untuk memperkenalkan RAD dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait tujuan transisi kendaraan listrik, WRI Indonesia bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan juga telah aktif melakukan sosialisasi RAD KBLBB di berbagai event

international seperti B20 Expo Summit dan Sustainable Transport Forum pada akhir tahun 2022. Selanjutnya, terkait implementasi dari seluruh strategi yang telah disusun pada RAD ini, Pemerintah Provinsi Bali dan WRI Indonesia telah berkomitmen untuk melanjutkan kolaborasi melalui pembentukan tim Program Management Office (PMO) yang telah disepekat melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani pada saat peluncuran RAD Januari lalu.

Selain itu, dalam upaya mendukung dekarbonisasi sektor transportasi melalui pengembangan bus listrik, melalui program TUMI E-Bus Mission, WRI Indonesia telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jakarta dan Transjakarta dalam pemberian program bantuan

teknis untuk peningkatan kesadaran masyarakat terkait dampak penggunaan bus listrik melalui pengembangan tool *E-Bus Emission Monitoring System*. Selain dukungan kami di Jakarta, WRI Indonesia juga telah berhasil menyelenggarakan workshop nasional terkait strategi pembiayaan dan peta jalan bus listrik yang mengundang tujuh pemerintah daerah yang terdiri dari kota Bandung, Medan, Pekanbaru, Palembang, Bogor, Semarang dan Denpasar serta perwakilan Kementerian Perhubungan dan Development Bank. Bersama dengan mitra TUMI lainnya, WRI Indonesia akan membantu Indonesia untuk mencapai target penerapan bus listrik untuk mendukung sistem transportasi yang lebih hijau dan berkelanjutan.





Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Clean Energy Investment Accelerator (CEIA) Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam West Java Investment Summit (WJIS) 2022 di Bandung, Jawa Barat, yang bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Jawa Barat sebagai katalisator industri hijau di Indonesia. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat dan Nirarta Samadhi selaku Country Director WRI Indonesia sekaligus perwakilan CEIA Indonesia.

Penandatanganan MoU Kerja Sama Realisasi Kawasan Industri Hijau melalui program pembangunan rendah emisi dan energi bersih pada kawasan Industri di daerah Jawa Barat antara Pemprov Jabar dan CEIA Indonesia ini berlangsung pada hari pertama WJIS 2022, tanggal 5 Oktober 2022. WJIS 2022 mengangkat tema "Green Investment: Food Security & Renewable Energy" dan berlangsung pada 5-6 Oktober 2022 di Trans Convention Center, Bandung.

Penandatanganan MoU tersebut memperlihatkan

komitmen dukungan WRI Indonesia terhadap Provinsi Jawa Barat untuk menjadi katalisator bagi industri hijau di Indonesia, melalui percepatan pembangunan rendah karbon dan implementasi energi bersih untuk sektor komersial dan industri, serta untuk menarik investasi hijau. Agenda MoU ini sejalan dengan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Jawa Barat 2018-2050, yang bertujuan untuk mencapai 28% energi terbarukan dan 41% pengurangan emisi pada 2050.

CEIA Indonesia akan membantu Provinsi Jawa Barat menjalankan RUED Jawa Barat 2018-2050 dengan memberikan dukungan dan bantuan untuk perencanaan dan pelaksanaan program-program pengembangan energi bersih dan rendah emisi di kawasan-kawasan industri di Provinsi Jawa Barat. Dukungan dan bantuan ini antara lain berupa penelitian dan pengembangan strategi rendah karbon dan energi bersih untuk kawasan-kawasan industri di Jawa Barat, serta bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan strategi komunikasi untuk mengakomodasi agenda transisi menuju pembangunan rendah karbon dan energi hijau.

Laut

Portofolio sektor kelautan merupakan program termuda di WRI Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau. Dengan lebih dari 60% kawasannya merupakan wilayah perairan, laju perekonomian Indonesia juga sangat tergantung dari pertumbuhan di sektor ini.

WRI Indonesia bekerja dekat dengan pemerintah guna mendukung pengelolaan sumber daya laut dan maritim yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari inisiatif global Panel Laut Berkelanjutan (Ocean Panel), sejak diluncurkan pada tahun 2018, Presiden Jokowi bersama-sama dengan 16 pemimpin dunia lainnya telah berkomitmen untuk mewujudkan misi pengelolaan sumber daya laut dan maritim secara berkelanjutan di bawah yurisdiksi nasional.

Salah satu capaian portofolio laut pada tahun 2022 adalah ketika Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama tujuh mitra non-pemerintah menandatangani Komunike Bersama, tepatnya pada tanggal 14 Juli 2022. Penandatanganan Komunike Bersama tentang Pengelolaan Sumber Daya Maritim Berkelanjutan yang dilakukan oleh WRI Indonesia, Konservasi Indonesia, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, KEHATI, Environmental Defense Fund, Destructive Fishing Watch, dan RARE, sebagai bentuk komitmen pemerintah bersinergi dengan semua *stakeholders* dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya maritim yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.





High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy

Melanjutkan inisiatif High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (Ocean Panel) untuk pembangunan laut berkelanjutan, di mana Indonesia adalah salah satu anggotanya, WRI Indonesia mendukung penulisan beberapa publikasi ilmiah terkait dengan karbon biru dan penulisan report Ocean Panel pada tahun 2022, dengan judul *"Optimizing Blue Carbon as a Natural Climate Solution"*.

WRI juga mendukung komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Indonesia guna memperkuat komitmen pemerintah untuk mencapai target

100% pengelolaan sumber daya laut dan maritim berkelanjutan di dalam yurisdiksi laut nasional. Kami juga berperan aktif dalam mendukung Ocean Panel Secretariat dan Tim Sherpa dalam kegiatan UNGA Ocean Panel Leaders Meeting. WRI Indonesia juga mendukung Kemkomarves dalam penyiapan berbagai materi publikasi dan komunikasi yang digunakan dalam rangkaian Konvensi Perubahan Iklim Tingkat Tinggi (COP27) di Mesir tahun 2022.

Dalam rangkaian kegiatan G20 pada tahun 2022, kami juga bekerja sama dengan peneliti dari beberapa organisasi untuk menyelesaikan *policy brief* terkait pengelolaan karbon biru (*blue carbon*) yang kemudian menjadi salah satu publikasi resmi T20 sebagai bagian dari kegiatan G20 di Indonesia.

Tata Kelola Laut dan Produksi yang Berkelanjutan

Tersedianya data yang kredibel serta analisis ilmiah terkait sumber daya kelautan sangat penting dalam upaya menciptakan laut yang sehat, kaya, dan berkelanjutan. WRI Indonesia, melalui penyusunan laporan bertajuk *"Trends in Marine Resources and Fisheries Management: A Review,"* memberikan analisis dari data-data yang dimiliki berbagai pihak. Laporan ini telah diluncurkan pada penghujung 2022 dengan mengundang penanggap dari sektor pemerintah, bisnis, akademisi, dan masyarakat pada umumnya.

WRI Indonesia menyadari bahwa pengelolaan sumber daya laut menyangkut banyak pihak. Oleh karena itu, penyusunan laporan ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di berbagai sektor. Laporan ini memberikan gambaran tren sumber daya laut dari segi ekonomi dan lingkungan, dengan tidak hanya berfokus pada sumber daya di laut tetapi juga pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya ini.

Dalam peluncurannya, laporan ini mendapatkan tanggapan dari perwakilan pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi. Selain itu, laporan ini juga mendapatkan perhatian dari media massa,

antara lain dalam artikel mendalam tentang kondisi ekosistem pesisir Indonesia dari Mongabay dan tulisan tentang penangkapan ikan berlebih dari The Jakarta Post.

Selain itu, dalam mendukung agenda pemerintah terkait pengelolaan ruang laut berkelanjutan, WRI Indonesia bekerjasama dengan The University of New South Wales (UNSW) melaksanakan riset mengenai Neraca Sumberdaya Kelautan (Neraca SDL/Ocean Accounting) bersama dengan The Global Ocean Account Partnership (GOAP). Ocean Accounting merupakan salah satu program pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan/ KKP) untuk mendukung pembangunan ekonomi biru dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Dalam proyek GOAP fase pertama di bulan November 2021 hingga Maret 2022, WRI Indonesia fokus melakukan studi kompilasi jasa ekosistem pesisir (mangrove, padang lamun, dan terumbu karang) sesuai dengan pedoman *Technical Guidance on Ocean Accounting* and SEAA-EA. Dalam hal ini, WRI Indonesia menyusun Laporan Faktor Jasa Ekosistem/*Ecosystem Services Factors* yang terdiri dari dua aspek yaitu kompilasi faktor jasa ekosistem pesisir di tingkat global dan panduan bertahap bagi pengguna/pembuat kebijakan terkait implementasi Neraca SDL.



Meningkatkan Kolaborasi dalam Upaya Pengurangan Sampah Plastik di Laut

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memegang peranan penting dalam upaya pengurangan sampah plastik, baik secara global maupun kawasan. Sampah plastik merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, sehingga kolaborasi menjadi kunci dalam upaya mengurangi sampah plastik di lautan dan menciptakan laut yang lebih sehat. WRI Indonesia, melalui inisiatif National Plastic Action Partnership (NPAP), terus melanjutkan upaya dalam mendukung pemerintah mencapai target nasional pengurangan sampah plastik sebesar 70% pada tahun 2025 sekaligus menciptakan laut dunia yang lebih sehat. NPAP adalah platform multipihak yang menghubungkan pembuat kebijakan, para ahli, pemimpin bisnis, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan akademisi untuk secara kolaboratif menyelesaikan masalah sampah plastik dengan menciptakan ekonomi sirkular untuk plastik.

Di tingkat global, dengan dukungan NPAP sejak awal, 175 negara menandatangani Traktat Plastik Global (*Global Plastic Treaty/GPT*) pada Maret 2022. Penandatangan ini merupakan momen

bersejarah karena traktat ini merupakan resolusi pertama yang membuka kesempatan untuk membentuk perjanjian multilateral yang mengikat secara hukum untuk mengatasi akar permasalahan dari pencemaran sampah plastik dan membuat target untuk mengurangi sampah plastik untuk tiap negara. Selain itu, traktat ini juga secara komprehensif membahas mengenai siklus hidup (*full life cycle*) dari plastik untuk mencapai ekonomi sirkular untuk plastik.

Pada tahun 2022, anggota NPAP juga bertambah menjadi 150+, yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta, OSM, organisasi internasional, serta akademisi dan *think tank*. Di penghujung tahun, NPAP berhasil mengumpulkan para pemangku kepentingan dari sektor-sektor tersebut dengan menyelenggarakan acara kolaboratif menjelang G20 bertajuk "*Beating Plastic Pollution*" (Melawan Sampah Plastik). Dalam acara ini, terdapat 39 institusi yang menyatakan 46 komitmen untuk menyelesaikan masalah sampah plastik di Indonesia, yang setara dengan investasi senilai 17,49 triliun rupiah hingga tahun 2030, menargetkan pengurangan sampah plastik dari lautan sebanyak 866 ribu ton serta memberikan dampak positif bagi 35,4 juta penduduk melalui investasi, pembangunan infrastruktur, dan edukasi sampah plastik.



Kota

Solusi Berbasis Alam

Denpasar dan Manokwari tahun ini bergabung dengan jaringan Cities4Forests Indonesia pada tahun 2022, sehingga total jumlah kota yang tergabung dalam program ini menjadi delapan kota (Medan, Pekanbaru, Jakarta, Semarang, Balikpapan, Denpasar, Jayapura, dan Manokwari). Untuk kota-kota tersebut, WRI Indonesia meningkatkan kapasitas kota untuk mengarusutamakan solusi berbasis alam (*Nature-based Solutions/NbS*) dalam pembangunan perkotaan. Kegiatan yang telah WRI Indonesia lakukan antara lain yaitu pengembangan metode dan pelatihan inventarisasi pohon. WRI Indonesia mengembangkan platform untuk mengumpulkan data pohon melalui aplikasi yang dapat mempermudah pengguna dalam

memasukkan data dan melakukan monitoring. Kami juga melakukan analisis ruang terbuka hijau *existing* dan rekomendasi pengembangan ruang terbuka hijau, perhitungan inventarisasi gas rumah kaca dari pepohonan selain hutan (*trees outside forest*) di perkotaan, dan pelatihan GIS tingkat dasar. Cities4Forests di Jayapura telah mengidentifikasi tempat-tempat penting masyarakat adat melalui pendekatan partisipatif yang hasilnya telah dimasukkan ke dalam *draft* revisi tata ruang. Selain itu, berdasarkan rekomendasi WRI Indonesia, Pemerintah Kota Jayapura telah menganggarkan *Master Plan* Ruang Terbuka Hijau di tahun 2023 dan memberikan perhatian khusus kepada Kampung Mosso yang akan dikembangkan sebagai tujuan ekowisata.





WRI Indonesia juga melakukan studi mengenai *needs assessment* dan *action plan* untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dan sosial di kota Manokwari dan Jayapura. Selain itu, kami juga melaksanakan studi terkait kesiapan lima kota pesisir yakni Medan, Balikpapan, Denpasar, Makassar, Jayapura dalam mengarusutamakan NbS di dalam perencanaan spasial. Sebagai tambahan, pada tahun 2022 WRI Indonesia juga turut membantu melakukan analisis terkait evaluasi efektivitas proyek mitigasi banjir di Jakarta. Hal ini berkaitan juga dengan peluang adopsi NbS terutama pada tiga lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah di analisis pada tahap sebelumnya. Berbagai studi terkait dengan banjir dan peluang adopsi NbS telah diserahkan ke Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dan digunakan sebagai bahan tambahan evaluasi proyek pengendalian banjir yang telah dilakukan.

Pada akhir tahun 2022, WRI Indonesia juga telah mengadakan *workshop* terkait pengarusutamaan NbS dengan mengundang perwakilan kota-kota anggota Cities4Forests serta perwakilan pengambil keputusan di pemerintah pusat seperti Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, KLHK dan PUPR. Pemerintah nasional menunjukkan komitmen yang kuat untuk kota-kota dapat mengarusutamakan NbS di dalam pembangunan perkotaan. Terkait dengan kegiatan komunikasi, WRI Indonesia juga memproduksi sebuah film pendek untuk menyampaikan pesan-pesan pengelolaan pohon kota untuk para pengembang, yang dipublikasikan melalui akun Instagram dan YouTube resmi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, masih dalam semangat kolaborasi dengan pemerintah serta bagian dari kegiatan konsultasi publik, Cities4Forests juga melakukan *media briefing* dan aktivasi taman pada bulan Juli 2022.



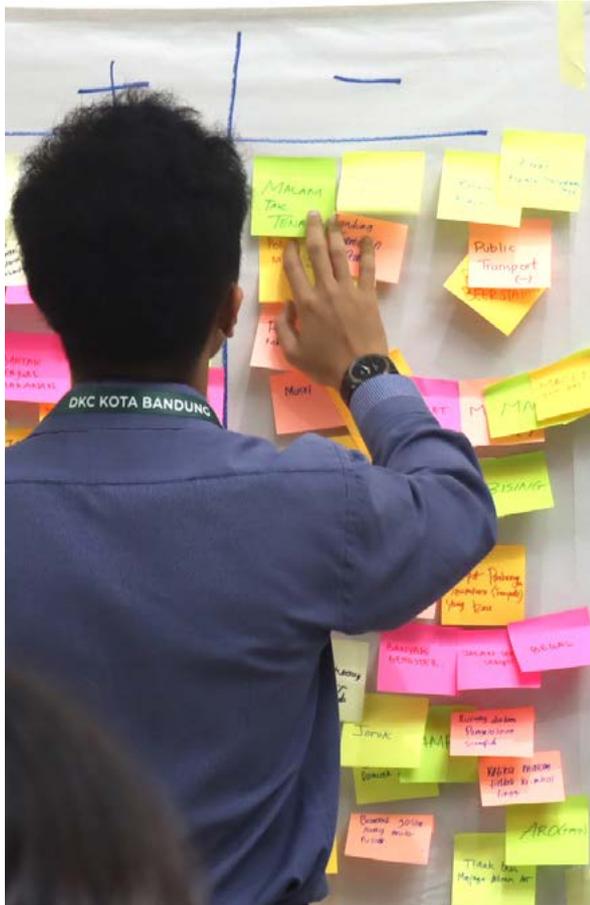
Ketahanan Kota

Clean Air Catalyst

WRI Indonesia berupaya meningkatkan kapasitas pemantauan kualitas udara di DKI Jakarta. Melalui program Clean Air Catalyst, tujuh paket instrumen pemantauan kualitas udara berskala *reference-grade* telah dibeli dan akan dipasangkan di tiga titik baru dan empat titik *existing* milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami juga memberikan pelatihan pemantauan kualitas udara berbasis teknologi *low-cost sensor*, yang bekerja sama dengan University of Colombia, sebagai alternatif dalam meningkatkan cakupan pemantauan di DKI Jakarta. WRI Indonesia juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam memimpin Koalisi Sosial Berskala Besar (KSBB) untuk sektor udara guna menyelaraskan program perbaikan kualitas udara bersama dengan aktor-aktor lain di DKI Jakarta.

Low Emission Zone

Pada tahun 2022, kami melakukan proyek *low emission zone* (LEZ) tahap 2 yang merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya di tahun 2021. Tujuan proyek LEZ tahap 2 yaitu memperkuat Pemerintah Jakarta dalam melakukan replikasi LEZ berkaca dari pengalaman implementasi LEZ pertama kali di Kota Tua. Pada tahap 2 ini, kami melakukan analisis spasial mengenai alternatif lokasi yang sesuai untuk penerapan LEZ selanjutnya, konsep dan tahapan implementasi, serta analisis dampak lalu lintas dan lingkungan pada lokasi yang terpilih. Selain itu, WRI Indonesia juga melakukan kegiatan untuk meningkatkan dukungan masyarakat terkait dengan perluasan LEZ. Kami telah mempresentasikan hasil kajian kepada Pemerintah Jakarta dan mendapat dukungan positif.



Safe and Sound Cities

Sebagai bagian dari rangkaian acara *hackathon* yang bertujuan untuk mengumpulkan ide-ide inovatif, WRI Indonesia melanjutkan kegiatan *mentorship placemaking* dan *business canvas/circular economy* dengan para pemenang *hackathon*. WRI Indonesia juga terus berdiskusi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga untuk mempertimbangkan potensi kolaborasi *placemaking* di Bandung dengan para pemenang *hackathon*. Di bulan Desember 2022, WRI Indonesia mempersiapkan aktivitas lanjutan berupa diskusi strategi, *revalidasi stakeholder mapping* dan *capacity gap identification* dengan anak muda di tingkat karang taruna serta pendampingan *co-ideasi* dengan organisasi yang didampingi.



Bloomberg Initiative for Global Road Safety

Melalui proyek Bloomberg Initiative for Global Road Safety (BIGRS), WRI Indonesia membantu Pemerintah Ho Chi Minh City (HCMC) dan Hanoi, Vietnam, untuk menurunkan kematian dan luka-luka serius akibat kecelakaan lalu-lintas, yang difokuskan kepada jalan dan mobilitas yang lebih berkeselamatan (*safer street and mobility*). Kegiatan yang kami lakukan yaitu membantu kedua kota untuk meningkatkan keselamatan melalui pembatasan kecepatan. Kami telah mengembangkan *website speed management measures* yang telah dibagikan kepada kedua kota, universitas, komunitas, serta stakeholder terkait lainnya. Berkolaborasi dengan WRI India, kami juga membantu HCMC untuk meningkatkan keselamatan koridor/persimpangan yang beresiko tinggi melalui inspeksi dan pengembangan konsep desain. Hasil temuan dan rekomendasi sementara telah dipresentasikan kepada HCMC dan mendapat masukan yang positif. Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan WRI India dan Colombia melakukan *workshop* mengenai prinsip jalur sepeda yang berkeselamatan untuk Pemerintah HCMC.

Iklim

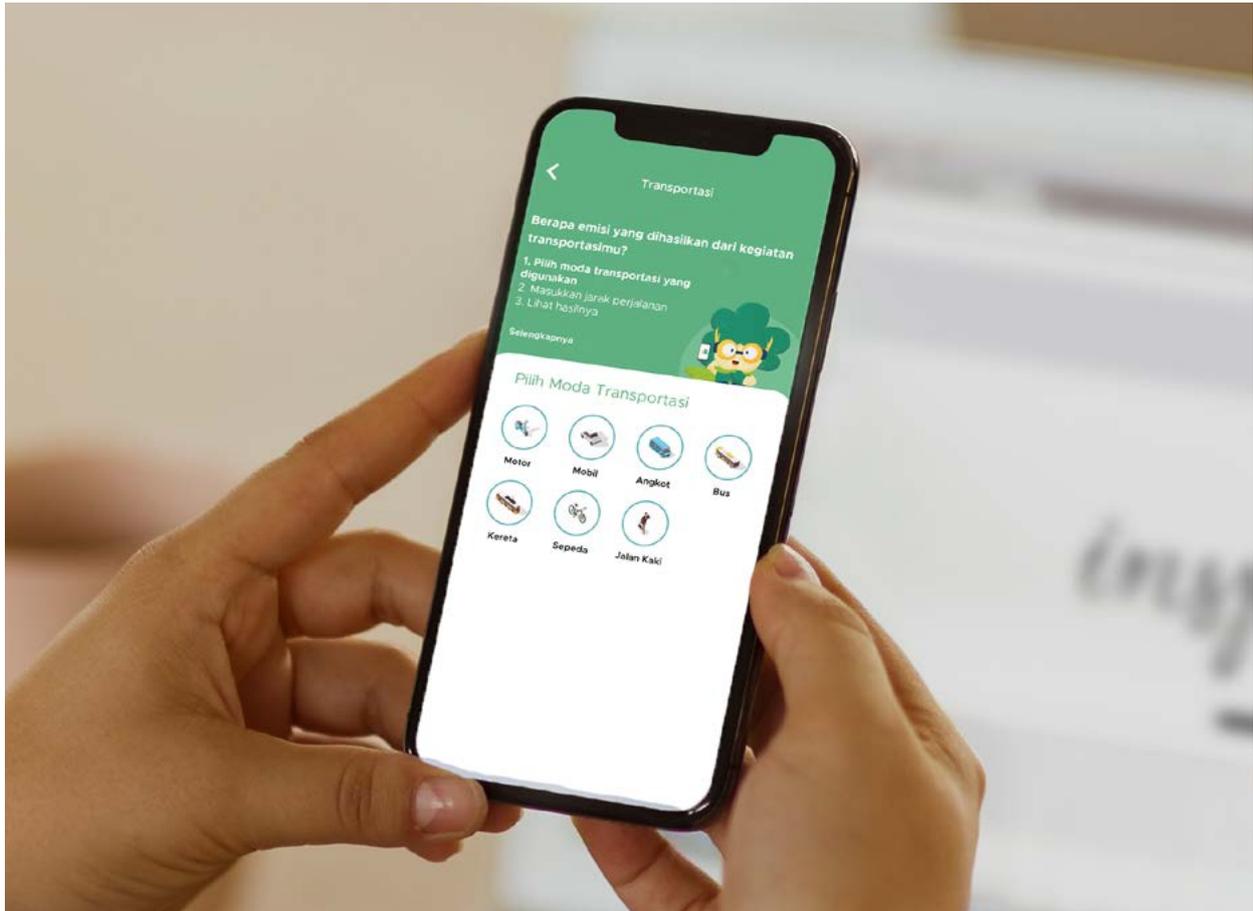
Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon

Melalui program Low Carbon Development Initiative (LCDI), WRI Indonesia mendukung Pemerintah Indonesia dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun provinsi. Pada tahun 2022, WRI Indonesia memberikan dukungan analisis dan skenario kebijakan pembangunan rendah karbon melalui pengembangan model *system dynamics* yang akan menjadi *background study* untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Tidak hanya itu, WRI Indonesia membantu Pemerintah dalam menyusun Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index*) yang akan menjadi alat ukur pencapaian ekonomi hijau dan rendah karbon bagi Indonesia. Laporan Green Economy Index telah diluncurkan pada side event G20 Development Working Group Meeting tanggal 9 Agustus 2022 di Bali.

Pada tahun 2022, WRI Indonesia juga memberikan dukungan dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) untuk tiga provinsi LCDI, yaitu Riau, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. RPRKD yang telah disusun bersama dengan Kementerian PPN/ Bappenas dan Pemerintah Provinsi tersebut diluncurkan pada tanggal 10 Agustus, 25 Agustus, dan 21 September 2022.

Dalam mendukung aksi iklim yang lebih ambisius, WRI Indonesia juga memberikan peningkatan kapasitas terhadap Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan analisis kebijakan menggunakan model *system dynamics*. Dalam konteks ini, sebuah *policy brief* berjudul "*Sustainable Management of Palm Oil Plantations to Support Low Carbon Development in Riau Province*" yang merupakan hasil kolaborasi WRI Indonesia dan Pemerintah Provinsi Riau diterbitkan.





Mengedepankan Gaya Hidup Berkelanjutan untuk Mengurangi Emisi

Kumpulan emisi gas rumah kaca di atmosfer merupakan salah satu faktor pendorong pemanasan global. Untuk meminimalkan dampak emisi karbon pada bumi kita, diperlukan upaya baik secara individu maupun kolektif. Sebagai lembaga riset independent, WRI Indonesia mengambil pendekatan berbasis ilmiah dan personal untuk mendorong perubahan masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan yang dapat membantu mengurangi emisi karbon, baik di tingkat individu maupun kelompok.

Pada tahun 2020, WRI Indonesia telah meluncurkan Aplikasi EMISI yang memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk secara mandiri mengurangi jejak karbon pribadi dari

sektor transportasi, makanan, pakaian, hingga penggunaan listrik. Walaupun terkesan kecil, tetapi upaya individu ini kemudian mendorong *ripple effect* yang besar. Dari yang mulanya mengampanyekan aksi individu.

WRI Indonesia kemudian berhasil mendorong kolaborasi kolektif melalui berbagai kegiatan, seperti implementasi kalkulator emisi dan penanaman pohon di aplikasi *ride hailing* Grab Indonesia, penanaman mangrove bersama organisasi Mangrove Nusantara di Bali, hingga kampanye media sosial bertajuk #DietEmisiPakaiMRT bersama MRT Jakarta. Tidak hanya itu, inisiatif ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak hingga WRI Indonesia mendapatkan bantuan dana sebesar US\$450.000 untuk menanam lebih dari 160 ribu pohon bersama para mitra penanam di Aceh, Jambi, Bali, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau.

Riset, Data dan Inovasi

Divisi Riset Data, dan Inovasi (RDI) WRI Indonesia terus berusaha untuk memberikan penjelasan berdasarkan basis ilmiah terhadap isu pembangunan berkelanjutan yang semakin hangat dibahas seiring semakin dirasakannya dampak dari perubahan iklim. Sepanjang tahun 2022, WRI Indonesia telah mengeluarkan publikasi serangkaian publikasi dari berbagai topik seperti: kebakaran lahan gambut, analisis terkait *blue carbon*, isu ketahanan pangan lokal, keterkaitan antara pemulihan ekonomi dan aksi iklim, metode peringatan dini terhadap perubahan tutupan pohon. Menutup tahun 2022 lalu, kami juga menerbitkan sebuah *report* yang bertajuk “*Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia*”. Capaian publikasi ini menjadi salah satu bukti dari komitmen WRI Indonesia untuk terus memberikan kontribusi terhadap perubahan nyata dalam isu-isu pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan data dan kajian ilmiah yang kuat.

Meskipun demikian, masih banyak hal yang perlu dikembangkan dalam hal produktivitas dalam menghasilkan publikasi-publikasi yang sangat penting untuk menunjang dinamika tren dalam pemerintahan, isu, dan kebijakan. Terdapat beberapa cara dari divisi RDI untuk menunjang produktivitas yang dimaksud, antara lain:

Research café dan sesi pelatihan. Pelaksanaan sesi Research Café secara lebih reguler. Sesi ini memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk mendiskusikan progres dari kegiatan risetnya. Pada sesi ini tim peneliti dapat mendapatkan masukan, berdiskusi terkait arah dari penelitian mereka. Selain itu juga tim RDI secara rutin mengadakan pelatihan-pelatihan dalam berbagai topik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penelitian dari para staf dan peneliti.

Briefing RDI. Dalam briefing ini, tim RDI WRI Indonesia dan Global memberikan pemaparan terkait proses-proses yang perlu dilakukan dalam mengeluarkan sebuah publikasi. Baik publikasi dalam bentuk *knowledge products* WRI, jurnal ilmiah, ataupun dalam bentuk lain. Hal penting yang selalu ditekankan disini adalah proses tinjauan terkait publikasi yang akan dikeluarkan

atau proses *peer review* yang sangat penting untuk menjaga integritas riset, validitas data, dan mendapatkan masukan dari pihak dalam dan luar organisasi yang dapat mengembangkan tulisan tersebut.

Kerja sama dengan WRI Global dan kantor internasional lainnya. Kolaborasi merupakan sesuatu hal yang selalu dikedepankan dalam kegiatan riset kami. Bahkan tidak hanya dengan jejaring WRI Global ataupun kantor internasional yang ada, tetapi juga dengan organisasi lainnya. Hal ini dapat membantu proses penggalangan dukungan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dalam isu terkait tata guna lahan, kelautan, perkotaan, iklim, dan energi. Selain itu banyak hal yang dapat dicapai melalui proses kolaborasi ini, antara lain adalah terjadinya proses *knowledge transfer* antarpeneliti lintas organisasi dan negara.

Tahun 2023 menjadi tahun yang krusial bagi Indonesia karena merupakan tahun politik, di mana akan marak propaganda-propaganda dari politisi dan partai politik dalam menyambut pemilihan umum 2024. Oleh karena itu, WRI Indonesia perlu mengambil peran lebih agresif dalam menyajikan *insights*, rekomendasi, dan data terkait isu pembangunan berkelanjutan. Sehingga kegiatan riset yang kami lakukan dapat menjadi semacam penyeimbang atau *voice of reasons* dari propaganda-propaganda terkait pembangunan dan lingkungan yang terkadang dapat menyesatkan selama proses kampanye dan pemilu berlangsung.



Komunikasi

Tahun ini kami melakukan restrukturisasi tim komunikasi, dengan penambahan dua senior *communications coordinator*, masing-masing ditugaskan di bawah portofolio AFOLU dan CECO. Di bawah struktur baru ini, tim komunikasi memberikan dukungan komunikasi yang lebih strategis untuk semua program dan mulai memperkuat profil publik organisasi. Tim komunikasi juga tumbuh menjadi sekelompok pemimpin, pekerja, pembuat konten, serta tim kreatif.

Meskipun ada keterbatasan karena COVID-19, WRI Indonesia terus memaksimalkan ruang digital untuk menjangkau masyarakat. Sepanjang tahun 2022, melalui AFOLU, CECO, serta konten dan aktivitas institusi, WRI Indonesia membagikan 124 konten melalui Instagram dan berhasil mencapai 15.984 pengikut, 20 ribu *likes*, lebih dari 640 ribu *impressions*, dan sekitar 23 ribu *engagements*. Selain media sosial, situs web WRI Indonesia juga telah dikunjungi lebih dari 700 ribu kali sepanjang tahun. Selain itu, ada sekitar 600 artikel media massa yang menyebut WRI Indonesia atau proyek yang kami dukung.

Pada tahun 2023, kami bercita-cita untuk memperkuat komunikasi dan keterlibatan WRI Indonesia, dengan penekanan untuk memberikan dampak melalui *storytelling* yang lebih kuat pada platform-platform relevan. Untuk memperkuat pesan kami kepada audiens yang lebih luas, kami akan melibatkan dan berkolaborasi dengan mitra, termasuk tetapi tidak terbatas pada media, *influencer* media sosial, dan pembuat *podcast*. Kami juga ingin meningkatkan profil WRI Indonesia dengan audiens utama melalui kegiatan institusional, program, dan regional, serta konten-konten untuk membangun kehadiran publik yang lebih kuat dalam menunjukkan hubungan manusia, alam, dan iklim.



WRI Indonesia membagikan **124** konten melalui Instagram



Berhasil mencapai **15.984** pengikut



20.000 likes



lebih dari **640.000** impressions



dan sekitar **23.000** engagements.



Selain media sosial, situs web WRI Indonesia juga telah **dikunjungi lebih dari 700.000** kali sepanjang tahun.



Selain itu, ada sekitar **600** artikel media massa yang menyebut WRI Indonesia atau proyek yang kami dukung.

Rekan dan Sahabat WRI Indonesia

KOALISI DAN KOLABORASI



Accountability Framework Initiative (AFi) - AFi merupakan wujud dari kolaborasi perusahaan dan organisasi masyarakat sipil untuk mempercepat peningkatan akuntabilitas dalam rantai pasok. AFi, yang diluncurkan pada pertengahan 2019, memberikan panduan yang jelas, konsisten, dan efektif, agar terjadi peningkatan akuntabilitas dalam implementasi komitmen rantai pasok yang lebih ramah lingkungan dan ramah sosial.

Aliansi Konservasi Indonesia (AKSI)

Aliansi Konservasi Indonesia (AKSI) - Didirikan pada tahun 2015 dengan nama Forum Komunikasi Konservasi Indonesia (FKKI) dan kini berubah menjadi Aliansi Konservasi Indonesia (AKSI), AKSI merupakan wadah diskusi sembilan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang konservasi alam dan pembangunan berkelanjutan.



Clean Energy Investment Accelerator (CEIA) Indonesia - CEIA Indonesia merupakan koalisi antara sektor publik dan swasta yang diinisiasi oleh Allotrope Partners, World Resources Institute, dan U.S. National Renewable Energy Laboratory (NREL) untuk mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan di sektor komersial dan industri di Indonesia.



Gotong Royong Atasi Susut & Limbah Pangan (GRASP) 2030 - GRASP 2030 adalah inisiatif berbasis sukarela yang mendorong tindakan bersama untuk mengurangi susut dan limbah pangan.



Koalisi Food and Land Use (FOLU) Indonesia - Koalisi FOLU Indonesia adalah inisiatif global yang berupaya untuk memperbaiki sistem pangan dan tata guna lahan di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang memimpin inisiatif ini, bersama dengan Kolombia, Etiopia, Cina, India, Australia, negara-negara Nordik, dan Inggris. Di Indonesia, inisiatif FOLU berfokus pada pola makan sehat, pertanian yang produktif dan regeneratif, konservasi dan restorasi alam, serta laut yang lebih sehat dan produktif. WRI Indonesia merupakan Sekretariat Koalisi FOLU di Indonesia.



Jejaring Mitra Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) - LTKL adalah forum yang menjembatani dukungan bagi kabupaten dari jejaring mitra pembangunan nasional dan global, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan swasta dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Melalui LTKL, arah pembangunan kabupaten didukung agar dapat menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.



Konsorsium Hari Hutan Indonesia (HHI) - Konsorsium HHI merupakan koalisi beranggotakan lebih dari 25 organisasi dan didukung lebih dari 70 kolaborator yang membantu menggaungkan perayaan Hari Hutan Indonesia setiap tanggal 7 Agustus. Tahun 2021, perayaan HHI diisi dengan pameran virtual, webinar, dan penandatanganan petisi.



Konsorsium RESTORE+ - RESTORE+ merupakan inisiatif yang diprakarsai oleh International Institute for Applied Systems (IIASA) dengan melibatkan World Agroforestry Center (ICRAF), WRI Indonesia, dan WWF Indonesia. RESTORE+ mengkaji pilihan kebijakan restorasi bentang lahan yang dapat sekaligus menjawab kekhawatiran terkait isu lingkungan, pangan, ketahanan energi, dan penggunaan lahan berkelanjutan. RESTORE+ di Indonesia telah mengembangkan aplikasi seluler Urundata sebagai platform pengumpulan data yang dibutuhkan dalam menyusun rencana restorasi.



Pantau Gambut - Pantau Gambut adalah platform daring yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan gambut serta memantau perkembangan kegiatan dan komitmen restorasi ekosistem gambut yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta pelaku usaha di Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatannya, Pantau Gambut didukung oleh berbagai organisasi tingkat nasional dan regional yang tergabung dalam Simpul Jaringan Pantau Gambut, yang tersebar di delapan provinsi di Indonesia.



Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI) - Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (Low Carbon Development Indonesia/LCDI), dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menganalisis berbagai opsi kebijakan pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Temuan analisis pembangunan rendah karbon telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dengan demikian, arah pembangunan Indonesia pada 2020-2024 mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.



People For Peat - Konsorsium People for Peat (PFP) merupakan inisiatif yang didanai oleh Uni Eropa, yang bertujuan untuk mendukung strategi pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan di ASEAN melalui aksi kolektif dan kolaborasi aktor non-pemerintah. Sebagai langkah awal, konsorsium yang terdiri dari WRI Indonesia, Tropical Rainforest Conservation & Research Center (TRCRC), dan Inisiatif Dagang Hijau ini berhasil melaksanakan rangkaian konferensi virtual bersama aktor non-pemerintah dari delapan negara Asia Tenggara.

Laporan Keuangan

Di tengah situasi pandemi dan krisis global, WRI Indonesia masih diberi kepercayaan dari mitra dan para pendukung. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 kami menerima dana dari pemerintah luar negeri dan lembaga filantropi independen. Untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas kami, pendapatan dan pengeluaran kami ditinjau secara berkala oleh auditor profesional.

Laporan Aset Bersih

SUMBER DANA	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2020	TAHUN 2019
Hibah/kontribusi	118.731	106.309	12.548	198.030
TOTAL	118.731	106.309	12.548	198.030

PENGELUARAN				
Kegiatan program	112.552	107.675	77.593	82.021
Administrasi	6.691	5.480	6.887	12.071
Pengembangan				
TOTAL BIAYA	119.243	113.155	84.480	94.091

ASET BERSIH				
Aset bersih awal tahun	125.947	132.793	204.724	100.785
Perubahan pada aset operasional	69.488	-5.777	-26.621	3.758
Perubahan pada aset terikat	53.838	-1.069	-45.310	100.181
Total perubahan pada aset	123.326	-6.846	-71.931	103.939
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	249.273	125.947	132.793	204.724

Rincian Pendapatan dan Pengeluaran Per Program

PENDAPATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2021		TAHUN 2020		TAHUN 2019	
Lembaga filantropi	100%	188.843	16%	16.574	22%	2.773	2%	4.148
Pemerintah luar negeri	0%	0	84%	89.765	78%	9.726	98%	193.845
Pendapatan lainnya	0%	-112	0%	-30	0%	49	0%	37
TOTAL PENDAPATAN	100%	188.731	100%	106.309	100%	12.548	100%	198.030

PENGELUARAN	TAHUN 2022		TAHUN 2021		TAHUN 2020		TAHUN 2019	
Pangan, hutan, air	35%	42.191	78%	88.790	76%	64.327	73%	69.014
Iklim	14%	17.093	10%	11.743	12%	10.103	9%	8.528
Energi	7%	8.111	4%	4.870	2%	2.110	2%	2.345
Strategi/administrasi	18%	21.399	2%	1.827	1%	682	1%	958
Kota dan transportasi	7%	7.753	0%	444	0%	371	1%	1.176
Operasional	19%	22.696	5%	5.480	8%	6.887	13%	12.071
TOTAL PENGELUARAN	100%	119.243	100%	113.155	100%	84.480	100%	94.091

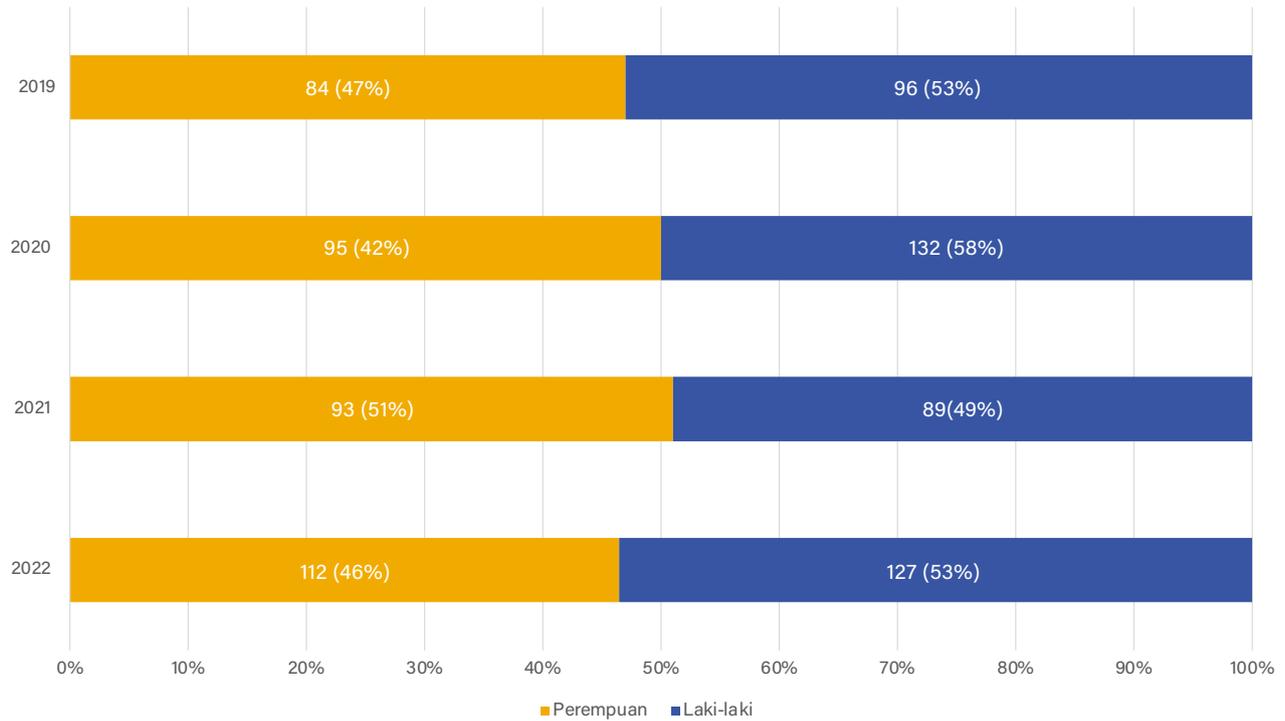
*Tahun anggaran 2022 (1 Januari 2022-31 Desember 2022) dibandingkan dengan tahun anggaran 2021, 2020, 2019

*Angka dalam juta rupiah



Sumber Daya Manusia

WRI Indonesia menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga dalam organisasi. Oleh karena itu, kami memberikan kesempatan yang adil bagi semua jenis gender untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi keadilan lingkungan. Angka proporsi gender fluktuatif dari tahun ke tahun, namun kami selalu mengupayakan keseimbangan komposisi gender. Kesetaraan dan keadilan gender adalah salah satu nilai yang dianut organisasi.



Bergabung dengan Komunitas WRI Indonesia

Jelajahi tulisan dan penelitian WRI Indonesia di wri-indonesia.org.

Dapatkan informasi terkini melalui buletin bulanan WRI Indonesia. Daftar sekarang di bit.ly/NawalaWRI.



Bergabunglah dalam percakapan dengan WRI Indonesia melalui:

-  facebook.com/WRIIndonesia
-  twitter.com/WRIIndonesia
-  linkedin.com/company/wri-indonesia
-  instagram.com/WRIIndonesia
-  youtube.com/c/WRIIndonesia

Kredit foto:

Sampul, sampul bagian dalam Abi Wardhana for WRI Indonesia; hal.3 Kemal Jufri for FOLU; hal.5 WRI Indonesia; hal.7 Annisa Nisitha/WRI Indonesia; hal.9 WRI Indonesia; hal.10 Tasniah Fauzi/WRI Indonesia; hal.11 WRI Indonesia; hal.12 Bustono; hal.13 WRI Indonesia; hal.14 Septika Sihite/WRI Indonesia; hal.15 Dewi Sari/WRI Indonesia; hal.16 Shutterstock, hal.17 Memora Productions untuk WRI Indonesia; hal.18 WRI Indonesia; hal.20 Kemenkomarves; hal.23 Getty Images; hal.24-25 KAIN Agency for WRI Indonesia; hal.26-27 WRI Indonesia; hal.28 Bappenas; hal.30 Julius Lawalata/WRI Indonesia; hal.36-37 WRI Indonesia.

Penanggung Jawab Laporan Tahunan 2022

Dr Nirarta Samadhi

Country Director,
World Resources Institute Indonesia

